

**MITIGASI BENCANA BANJIR
MELALUI PENDEKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DI WILAYAH SUNGAI CITARUM HULU**

oleh

Soleh

FISIP Universitas Wiralodra-Indramayu

Email: soleh_fisip@unwir.ac.id

ABSTRAK

Banjir sering terjadi di berbagai kota di Indonesia, antara lain di Bandung, yang merupakan wilayah sungai Ciratum Hulu. Kejadian banjir tersebut, menimbulkan banyak kerugian bagi negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat harus melakukan upaya mitigasi bencana banjir agar dapat menekan nilai kerugian dampak banjir sehingga dapat mengurangi resiko banjir. Upaya mitigasi yang dilakukan harus berbentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam mengkaji upaya mitigasi banjir ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data ini menjelaskan informasi tertulis yang bersumber dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggalan data dengan cara indepth interviu dan FGD. Hasil analisis, menunjukkan bahwa telah ada upaya mitigasi banjir di Wilayah Sungai Citarum baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun adanya kerjasama dengan masyarakat atau disebut adanya partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengajak masyarakat dalam perencanaan mitigasi banjir. Kegiatan perencanaan mitigasi yang melibatkan masyarakat dilakukan dengan mengkaji dan mendiskusikan hal-hal yang mungkin terjadi baik sebelum banjir terjadi, tanggap darurat ketika banjir dan pemulihan pasca banjir, dengan demikian diharapkan muncul upaya mitigasi banjir dengan lahirnya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi banjir dengan lebih baik. Namun demikian, upaya mitigasi banjir ini memang belum bisa sepenuhnya dapat menyelesaikan banjir dan dampaknya hal ini ditandai dengan masih sering terjadi banjir walaupun dari sisi intensitas dan kuitas yang menurun. Agar banjir benar-benar dapat dikendalikan maka adalah upaya sebelum terjadinya bencana banjir harus lebih intensif dilakukan dibanding dengan kegiatan rehabilitasi pasca banjir. Untuk itu, kedepan implementasi undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Mentri PUPR No. 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air harus benar-benar efektif. Garis besar dari kedua peraturan diatas adalah perlunya menjamin kegiatan mitigasi baik secara struktural maupun non struktural berjalan terus seiring siklus management bencana, dimulai dari perencanaan mitigasi, tanggap darurat, pemulihan, dan menyusun rencana mitigasi kembali yang melibatkan masyarakat.

Kata Kunci: Mitigasi, Banjir, Partisipasi.

PENDAHULUAN

Beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Samarinda, Jakarta dan kota lainnya selalu terancam bahaya banjir dengan frekuensi yang cukup tinggi. Khususnya di Bandung yang memiliki daerah dengan kontur rendah sehingga bahaya banjir selalu mengancam. Oleh karenanya, kejadian banjir selalu berulang di setiap musim hujan, seperti pada tahun 1996, 2002 dan sampai 2021.

Bencana banjir bisa terjadi disebabkan beberapa faktor baik oleh karena tingginya curah hujan, penggundulan hutan seperti di Gunung Wayang dan sekitarnya di Kabupaten Bandung, dan diperburuk oleh kurang cukupnya dan kurang berfungsinya sistem drainase perkotaan sehingga pembuangan air menjadi terhambat dan juga karena perilaku masyarakat yang membuang

sampah ke sungai sehingga dapat menumpuk di sungai dan menyumbat serta menghambat laju air.

Disamping itu, seiring berlalunya waktu, sampai saat ini masih terjadi perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan di daerah tangkapan air, seperti pembangunan perumahan di Bandung Utara. Pesatnya laju perubahan penggunaan lahan (ruang terbuka tanah dan hutan kota menjadi berbagai bangunan beton, tembok dan aspal) mempersempit dan memperkecil ruang terbuka untuk peresapan air pada gilirannya menyebabkan makin besarnya debit puncak banjir pada sistem aliran sungai Citarum di Bandung. Selain itu, kondisi aliran sungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan akibat bangunan dibantaran sungai serta pelumpuran dan penumpukan sampah yang tinggi menyebabkan makin parahnya situasi.

Beberapa usaha untuk mengatasinya oleh Pemerintah sudah dilaksanakan, seperti pembersihan dan normalisasi sungai, penyiapan sistem pemantauan muka air sungai, persiapan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mempersiapkan bantuan penanggulangan bencana bagi masyarakat di kelurahan-kelurahan yang rawan terkena banjir telah dilakukan, sehingga diharapkan bahwa bahaya banjir dan dampaknya dapat diperkecil, besarnya korban harta dan jiwa dapat dikurangi seminimal mungkin. Tetapi upaya pemerintah saja tidak akan cukup dalam menyelesaikan masalah bencana banjir tentu diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif stakeholder lainnya terutama masyarakat dilokasi dan sekitar bencana banjir sendiri.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengendalian atau mengurangi dampak bencana banjir secara non structural melalui pendekatan bottom up sistem dengan menggerakkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mendukung usaha-usaha Pemerintah dan masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana banjir di masa datang. melalui peningkatan keberdayaan masyarakat sendiri, sehingga penderitaan masyarakat akibat bahaya bencana banjir dapat ditekan serendah-rendahnya melalui usaha masyarakat yang bersifat mengurangi kemungkinan terjadinya bencana banjir serta meningkatkan kemampuan menanggulangi bahaya banjir secara swadaya. Kegiatan semacam ini merupakan salah satu bentuk dari kepedulian masyarakat sendiri dalam rangka mengurangi penderitaan masyarakat yang terancam bahaya banjir. Kegiatan mitigasi dengan berbasis pada kemampuan masyarakat ini adalah untuk memperkuat kapasitas masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana banjir dalam menghadapi resiko bencana banjir dan diharapkan dapat mengurangi resiko bencana dimasa datang, menumbuhkan inisiatif dalam penentuan tindakan prioritas dan mencari solusi bagi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam menghadapi bencana banjir.

Hal ini bisa diartikan sebagai kegiatan bahu membahu antara masyarakat dan pemerintah sebagai usaha bersama untuk mereduksi kerugian dan penderitaan akibat banjir di daerah perkotaan di Indonesia.

Jenis-jenis kegiatan yang bisa dilakukan :

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat atas resiko tinggi di daerah yang rawan bencana banjir melalui penyuluhan dan lain-lain.
2. Memberikan gambaran dan informasi mengenai berbagai jenis kegiatan penanggulangan bencana banjir yang dapat dilakukan oleh masyarakat.
3. Mengembangkan inisiatif masyarakat dalam menurunkan resiko bencana banjir melalui peningkatan cara hidup dan perbaikan lingkungan hidup.
4. Mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan banjir oleh melalui proses identifikasi dan prioritas kegiatan dan implementasinya oleh masyarakat.

Membangun Kelembagaan Mitigasi dan Perencanaan Implementasi Kegiatan:

1. Persiapan kegiatan pembentukan steering committee, melibatkan instansi pemerintah, donatur dan kelompok masyarakat dari lokasi kegiatan.
2. Studi dan survey pendahuluan.
3. Penyusunan profil masyarakat, melalui pemahaman atas kerentanan dan kekuatan/kemampuan mitigasi terhadap bahaya bencana banjir, serta pemahaman kondisi sosio-ekonominya,
4. Pelatihan dan kegiatan partisipatif bagi masyarakat dalam
 - a. Mengenali resiko banjir
 - b. Mengembangkan formulasi kegiatan mitigasi banjir
 - c. Mengidentifikasi alternatif kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan
5. Mendampingi masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan mitigasi.
6. Mendampingi masyarakat dalam pengadaan sumberdaya.
7. Pelaksanaan kegiatan dan pemantauan.
8. Evaluasi hasil kegiatan serta rekomendasi untuk masa yang akan datang.
9. Penyusunan laporan kegiatan

ANALISIS

Kegiatan pengendalian banjir secara non struktural melalui pendekatan bottom up sistem dengan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi dampak bahaya bencana banjir dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau metode PPKDRB PPKDRB adalah singkatan dari Pendekatan Partisipatif Kondisi Daerah Rawan Bencana Banjir PPKDRB berarti proses belajar dan bekerja bersama menggunakan serangkaian teknik yang terencana yang dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pengetahuan dan daya

analisis mereka mengenai kondisi kehidupan mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana tindakan yang layak dan mampu menyusun strategi kelangsungan hidupnya. Pada pelaksanaan PPKDRB masyarakat difasilitasi oleh orang luar seperti para peneliti, donor atau petugas agar mampu menganalisis kondisi kehidupannya yang mencakup potensi atau permasalahan yang ada di daerahnya. Kemudian masyarakat difasilitasi untuk dapat menyusun program berdasarkan potensi yang ada di daerahnya dan potensi yang ada diluar daerahnya yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat guna memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat tersebut.

Metode PPKDRB (adaptasi dari PRA, Participatory Rural Appraisal) ini muncul dilatarbelakangi pengalaman yang cukup lama dari ahli pembangunan masyarakat, Robert Chambers (1983), dalam bidang pengembangan masyarakat di beberapa negara berkembang. Dari pengalaman tersebut disimpulkan bahwa masyarakat terutama kelompok yang marginal (kurang beruntung) seperti petani miskin perempuan dan pemuda harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Mereka harus kita dengarkan pendapatnya, keluhannya, pengalamannya, harapannya serta kemampuan analisisnya untuk kemudian kita fasilitasi agar mampu membuat rencana. Jadi mereka bukan hanya sebagai penerima/obyek pembangunan semata, tetapi memposisikan mereka sebagai pelaku pembangunan.

Menurut Conyers (1984) memposisikan masyarakat sebagai pelaku pembangunan adalah penting karena merupakan sumber informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. sehingga tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal karena tidak tepat treatmentnya. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika dilibatkan sejak proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka menjadi lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut, Ketiga, merupakan hak masyarakat untuk dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Prinsip Dasar PPKDRB

Berdasarkan metode/pendekatan yang telah dibahas di atas, PPKDRB menekankan pada proses pelaksanaan kajian secara partisipatif (bukan eksploratif). Penekanan pada proses yang partisipatif inilah yang menjadi paradigma PPKDRB. Paradigma ini akan menjadi lebih jelas dengan memahami prinsip-prinsip dasar PPKDRB berikut. Ada 11 prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan PPKDRB, yaitu :

1. Belajar dan masyarakat Prinsip yang paling mendasar dalam PPKDRB adalah prinsip bahwa PPKDRB adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti, PPKDRB dibangun pada pengakuan dan kepercayaan terhadap nilai, relevansi pengetahuan tradisional masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah-masalahnya sendiri. Prinsip ini merupakan pembalikan dari metode konvensional yang bersifat "mengajari" masyarakat.

2. Orang luar (peneliti, tenaga ahli, petugas, sebagai fasilitator, orang dalam (masyarakat) sebagai pelaku Sebagai konsekuensi dan prinsip pertama adalah perlunya para orang luar menyadari perannya sebagai "fasilitator" dan bukan sebagai "pelaku, guru, penyuluh atau peneliti" Oleh karena itu, perlu sikap rendah hati, bersedia untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai nara sumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Dalam penerapan PPKDRB, masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan.
3. *Saling belajar saling berbagi pengalaman.* Walaupun ada pengakuan atas pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat, bukan berarti masyarakat selamanya benar dan dibiarkan tidak berubah Demikian juga, pengetahuan "modern" yang diperkenalkan oleh orang luar tidak selalu dapat memecahkan masalah mereka Oleh karena itu, antara pengalaman dan pengetahuan masyarakat dengan pengalaman dan pengetahuan orang luar saling melengkapi dan sama pentingnya Proses PPKDRB adalah ajang dialog antara kedua sistem pengetahuan itu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik.
4. *Santai dan Informal.* Kegiatan PPKDRB hendaknya diselenggarakan dalam suasana yang bersifat luwes, terbuka, tidak memaksa dan informal. Situasi yang santai ini akan menimbulkan hubungan akrab, karena orang luar akan berproses masuk sebagai anggota kelompok diskusi bukan sebagai tamu asing.
5. *Keterlibatan semua kelompok masyarakat.* Kekeliruan yang sering dibuat adalah menganggap bahwa pimpinan formal, tokoh tokoh masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat dapat mewakili seluruh masyarakat Kekeliruan seperti inilah yang kemudian melahirkan program yang hanya memenuhi kepentingan suatu golongan tertentu.
6. *Menghargai perbedaan.* Mengingat peserta PPKDRB adalah masyarakat yang heterogen (berbagai macam golongan atau tipe), tentu akan muncul berbagai pendapat atau pandangan Oleh karena itu semangat saling menghargai harus dibina Inti kegiatan adalah mencoba sejumlah variasi informasi dan bukan memberikan rata-rata hasil Variasi informasi dan masalah ini kemudian diorganisasikan dan diurutkan prioritasnya oleh masyarakat sebagai pemiliknya
7. Triangulasi. Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dapat digunakan triangulasi yang merupakan bentuk "pemeriksaan dan pemeriksaan ulang" (check and recheck). Triangulasi dapat dilakukan melalui :
 - a. *Penggunaan variasi dan kombinasi berbagai teknik PPKDRB.* Setiap teknik PPKDRB mempunyai kelebihan dan kekurangan, sebab tidak semua informasi yang diperlukan dapat diperoleh, dibahas dan dimanfaatkan dengan satu atau dua teknik saja Dengan demikian diperlukan kombinasi dan berbagai teknik PPKDRB agar bisa saling melengkapi Desain PPKDRB sangat diperlukan pada saat persiapan agar pada pelaksanaannya sudah memiliki target yang jelas serta tidak terjadi tumpang tindih informasi yang diperlukan.

- b. *Menggali berbagai jenis dan sumber informasi.* Kebenaran setiap informasi harus dikaji ulang dari sumber-sumber dan teknik teknik lainnya. Misalnya dalam data sekunder menunjukkan bahwa luas areal banjir adalah sekian hektar, ternyata dari hasil laporan warga luasnya menunjukkan angka yang berbeda Dengan demikian. diperlukan kajian silang dari berbagai sumber informasi agar ada kesamaan data yang sebenarnya, untuk menghindari kesalahan alokasi bantuan dan pertolongan.
- c. *Tim PPKDRB yang multi disiplin.* Sudut pandang yang berbeda dari anggota tim yang memiliki latar belakang disiplin ilmu yang bervariasi akan memberikan gambaran yang lebih lengkap terhadap penggalan informasi, serta diharapkan tidak ada permasalahan yang mengambang tanpa ada solusi yang terbaik
8. Mengoptimalkan hasil Pelaksanaan kegiatan PPKDRB memerlukan waktu, tenaga, biaya. kesabaran, ketelitian yang tidak sedikit dari para fasilitator dan masyarakat Untuk mendayagunakannya diperlukan persiapan dan pelaksanaan yang matang. Hendaknya PPKDRB mengkaji pada hal-hal yang penting. maka kegiatan PPKDRB hendaknya mengoptimalkan kegiatannya dengan mengkaji hal-hal yang dianggap paling penting secara optimal dan kesimpulan yang belum tentu 100% benar tetapi cenderung mendekati kebenaran.
 9. Belajar dari Kesalahan. Melakukan kesalahan, yang sering dianggap tidak wajar, dalam PPKDRB adalah sesuatu yang wajar. Yang penting bukanlah kesempurnaan dalam penerapan yang tentu sukar dicapai, tetapi penerapan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada, kemudian belajar dari kekurangan/kesalahan yang terjadi, agar pada kegiatan berikutnya menjadi lebih baik.
 10. Orientasi Praktis. PPKDRB berorientasi pada pemecahan masalah dan pengembangan program. Untuk itu dibutuhkan informasi yang relevan (yang ada kaitannya dengan program) dan memadai. Yang diperlukan adalah pengetahuan yang optimal, bukan semua informasi harus dicari dan digali sedalam-dalamnya. Prinsipnya, perkiraan yang tepat akan lebih baik daripada kesimpulan yang pasti tetapi salah atau lebih baik mencapai perkiraan yang hampir salah daripada kesimpulan yang hampir benar. Kesimpulan yang hampir benar berarti mendekati kesalahan. Namun jika pemikiran yang hampir salah berarti mendekati kebenaran.
 11. Berkelanjutan. Kegiatan PPKDRB bukanlah sebuah "paket kegiatan" yang selesai setelah penggalan informasi dianggap cukup. Kepentingan-kepentingan dan masalah masalah masyarakat tidaklah tetap, tetapi berubah dan bergeser menurut waktu sesuai dengan berbagai perubahan dan perkembangan baru dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu PPKDRB harus merupakan jiwa yang harus dihayati lembaga dan para pelaksana di lapangan.

Teknik-teknik PPKDRB dapat dilakukan dengan menggunakan banyak teknik sesuai dengan kebutuhan; antara lain Teknik Penelusuran/Alur Sejarah, Teknik Pemetaan/Pembuatan Peta Lokasi Teknik Transek/Penelusuran Lokasi, Teknik Pembuatan Gambar/Sketsa, Teknik Penyusunan Kalender Musim, Teknik Jadwal Sehari, Teknik Pembuatan Bagan Kecenderungan dan Perubahan, Teknik Diagram Venn/ Kajian Kelembagaan, Teknik Analisa Mata Pencaharian Teknik Pembuatan Bagan Alur Reaksi, Teknik Matrik Ranking, Pengorganisasian Masalah, Wawancara Semi Terstruktur.

KESIMPULAN

Dari berbagai kegiatan PPKDRB diatas dapat lahir suatu ikatan kerjasama yang solid antara berbagai stakeholder dalam mitigasi banjir. Sehingga muncul kebiasaan upaya bersama dalam menghadapi banjir.

REFERENSI

- Community Based Disaster Risk Management Course, 2006. Community Risk Assessment Modul, Asian Disaster Preparedness Center, Bangkok, Thailand.
- Driyamedia. 1996. "Berbuat Bersama Berperan Setara". Acuan Penerapan Participatory Rural Appraisal, untuk Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara. Studio Driya Media, Bandung.
- LBDS. 1996. Modul Pelatihan PRA Bagi Petugas Lapangan Tingkat Kecamatan dan Tokoh Masyarakat. Proyek Konservasi dan Pengelolaan DAS Cimanuk Hulu. Lembaga Bangun Desa Sejahtera, Garut.
- Soleh Hadisutisna, 2000. Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan (PPKP), Pusat Dinamika Pembangunan Universitas Padjadjaran.
- Kusnaka Adimihardja, MA, DR., Harry Hikmat, Ir., M.Si, 2001. Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, Humaniora Press Bandung,
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17/2019 tentang Sumberdaya Air
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana